

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 *Tentang Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 06/2016. *tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016. *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). Buletin Teknis Nomor 15 *tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2013). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013. *tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sekretariat Daerah DIY.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 . *tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121)*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sekretariat Daerah DIY.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 . *tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No 123)*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sekretariat Daerah DIY.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018. *tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sekretariat Daerah DIY.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2018 . *tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi*

- Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sekretariat Daerah DIY.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I tahun 2020. BPK RI.
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. (2020). Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrua Tahun 2020. Daerah Istimewa Yogyakarta: DPUPESDM DIY.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Monika Sutri Konilung Ventje Ilat Ilat Sherly Pinatik. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 818-830.
- Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, 24.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.